



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

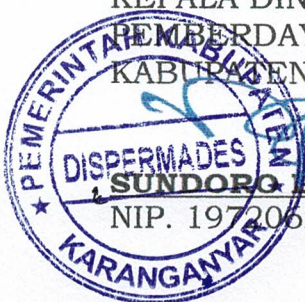
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah kami selesaikan penulisan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 sesuai dengan sistematika dan acuan yang telah ditetapkan. Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan laporan atas pelaksanaan tugas dan kegiatan selama 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024 untuk disampaikan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 1 (satu) tahun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Sebagai wujud pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara lain dengan peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa khususnya dalam Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas ini kami susun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan selama 1 (satu) tahun. Kami merasa bahwa laporan ini masih banyak terdapat kekurangannya. namun kami telah berusaha baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami mengharapkan masukan dan saran bagi para pembaca/Instansi terkait untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Karanganyar , 31 Desember 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P
NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	I
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum	I-2
C. Maksud dan Tujuan	I-2
BAB II DESKRIPSI UNIT KERJA	II-1
A. Tugas dan Fungsi.....	II-1
B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD	II-4
C. Standard Operating Procedure (SOP) OPD	II-5
D. Perda/Perbup yang berkaitan dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan	II-5
E. Struktur Organisasi.....	II-5
F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan	II-6
BAB III CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	III-1
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	III-1
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	III-1
C. URUSAN PILIHAN	III-1
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG... ..	III-2
BAB IV HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	IV-1
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.....	IV-1
B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	IV-1
C. URUSAN PILIHAN	IV-12
D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG... ..	IV-12
BAB V CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	V-1
BAB VI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..	VI-1
BAB VII INOVASI DAN PENGHARGAAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang secara langsung menangani Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Agar potensi yang dimiliki dapat berperan strategis dalam pembangunan di Kabupaten Karanganyar, Pemberdayaan Masyarakat harus dilakukan dengan prinsip pengentasan kemiskinan yang terencana dan terkoordinasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait, terutama sebagai sasaran utama program pembangunan masyarakat dan desa. Potensi Masyarakat dan Desa yang perlu terus diperhatikan dan dikembangkan, untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Disamping itu perlunya pemanfaatan sumber daya alam dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan penerapan teknologi pedesaan yang berwawasan lingkungan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu unsur pelaksana Instansi yang menangani Pemberdayaan Masyarakat, berkewajiban menyajikan Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2024 yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala OPD sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dijabarkan dalam program kerja selama satu tahun anggaran perlu dilaporkan dan dievaluasi untuk menilai kinerja OPD. Pelaksanaan program kerja meliputi pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan yang memuat data kuantitatif serta informasi yang dirangkum dari kegiatan pembangunan masyarakat dan desa di Kabupaten Karanganyar.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar .
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024
7. Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Rencana Kerja Anggaran Penetapan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penetapan.
9. Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas adalah harapan untuk mencapai program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan laporan pencapaian

program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan dan Desa yang diadakan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024. Laporan Pelaksanaan Tugas ini untuk mengkomunikasikan pencapaian indikator tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta program kegiatan untuk mempertanggung jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan program kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

DESKRIPSI UNIT KERJA

A. Tugas dan Fungsi.

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 1a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan.;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
 - 4) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian, dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (a), Sekretaris mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian kegiatan;
2. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. pengoordinasian tatalaksana;
5. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

2. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dispermades.

3. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa merupakan unsur pelaksana Administrasi Pemerintahan Desa.

b. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1) Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;

c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi pemerintahan desa dan perangkat desa;
dan

d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

a. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa merupakan unsur pelaksana pengelolaan keuangan dan aset desa.

b. Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan desa serta pengelolaan aset desa;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksana pemberdayaan masyarakat desa
 - b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD.

Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Karanganyar yaitu Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

C. Standard Operating Procedure (SOP) OPD.

Standard Operating Procedure Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada di pelaksanaan Dana Desa (DD), SOP pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

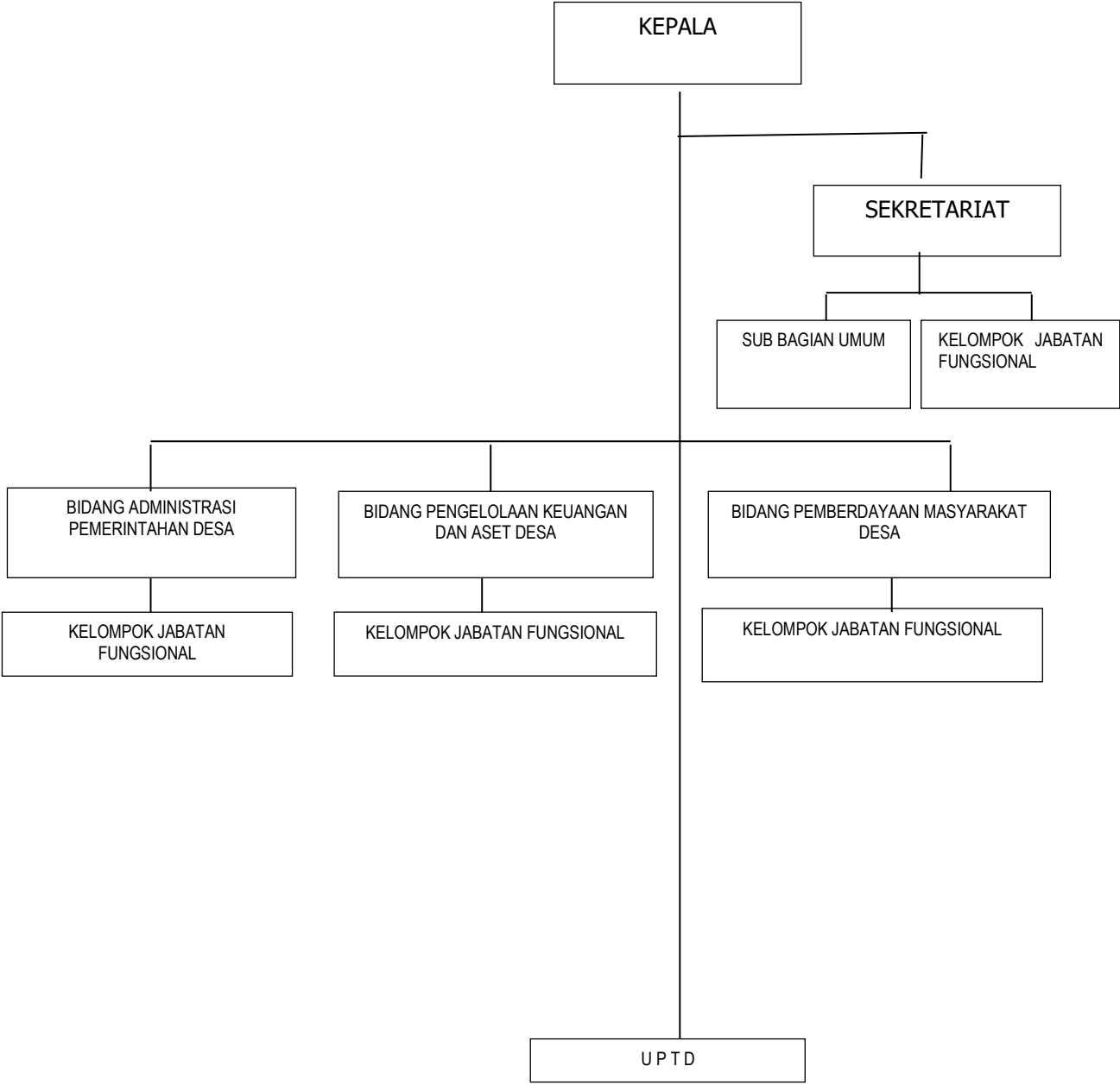
D. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa.
5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 411.2/128 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I, Sengkuyung II, dan Sengkuyung III

E. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar. Adapun Bagan Susunan Organisasi sebagai berikut :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR



F. Kepegawaian Berdasarkan Urusan yang dilaksanakan.

1). Daftar Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

N O	NAMA	NIP	(PNS/ CPNS)	PANGKAT/ GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos	19620620 199203 1 002	PNS	Pembina Utama Muda / IV.c
2.	Soenarto, S.P, M.M	19710315 199703 1 009	PNS	Pembina Tk.I/ IV.b
3.	Ary Widyahastutik, S.STP, MM	19820123 200012 2 001	PNS	Pembina / IV.a
4.	Diana Ary Andriyati, S.H	19830704 200604 2 008	PNS	Penata Tk.I / III.d
5.	Y. Anung Darmawan, SE	19720528 200501 1 005	PNS	Penata Tk.I / III.d
6.	Sudinar, S.Pd, MM	19710319 199203 1 003	PNS	Pembina / IV.a
7.	Ngadiyono, SE, MM	19730211 199503 1 003	PNS	Pembina / IV.a
8.	Agus Cahyono, S.Sos, M.Si	19710811 200604 1 011	PNS	Pembina / IV.a
9.	Agus Setyawan, S.Sos	19710805 199301 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d
10.	Ardhyka Mur Hermawan, SIP, MM	19870121 200701 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d
11.	Rahayu Nurrohmani, SH	19790910 200604 2 017	PNS	Penata Tk.I / III.d
12.	Harun Waskito, S.Sos, MAP	19800420 200912 1 001	PNS	Penata Tk.I / III.d
13.	Agus Priyono, SE	19740820 200312 1 002	PNS	Penata Tk.I / III.d

14.	Hariyanti, S.Sos	19670109 199402 2 001	PNS	Penata Tk.I / III.d
15.	Eko Pujiati, S.H	19800707 200604 2 027	PNS	Penata Tk.I / III.d
16.	Dwi Prihanto, S.IP, MSi	19810221 201001 1 017	PNS	Penata Tk.I / III.d
17.	Sri Purwati, S.Sos	19791218 201101 2 009	PNS	Penata / III.c
18.	Jalu Prasetya Aji, S.A.P, MSi	19800704 201101 1 010	PNS	Penata / III.c
19.	Willyanto Wardhana ,S.Sos	19850419 201101 1 013	PNS	Penata / III.c
20.	Irfan Afifudin, S.Sos	19850608 201101 1 013	PNS	Penata / III.c
21.	Priska Hevianggitasari, S.Sos	19870130 201101 2 012	PNS	Penata / III.c
22.	Andri Yudiyanto, SE	19840517 201503 1 003	PNS	Penata / III.c
23.	Andi Prasetyanto,A.Md	19860314 201001 1 012	PNS	Penata Muda / III.a
24.	Zalduyah, S.Sos	19760723 200701 2 020	PNS	Penata Muda Tk.I/ III.b
25.	Fajar Setya Nugraha, S.Kom	19871116 202012 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
26.	Wahono Guntur Prakosa, SE	19890220 202012 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
27.	Ippolita Suharto, SE	19930628 202012 2 007	PNS	Penata Muda / III.a
28.	Mario sebastian Prabowo, SIP	19890331 202203 1 002	PNS	Penata Muda / III.a
29.	Vika Mutiara Pradanai, S.Sos	19971219 202203 2 018	PNS	Penata Muda / III.a

30.	Bagas Kurnia Adi, SIP	19981129 202203 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
31.	Alina Prama Septa, A.Md	19880901 201503 2 003	PNS	Penata Muda / III.a
32.	Dewan Sidiq Atmaja Putra, A.Md	19901212 201503 1 006	PNS	Penata Muda / III.a
33.	Tri Suwarno	19730219 200701 1 007	PNS	Penata Muda / III.a
34.	Hartono	19790906 201001 1 012	PNS	Pengatur / II.c
35.	Suroto	19750627 200701 1 001	PNS	Pengatur Muda / II.a
36.	Ramdhan Ashari, A.Md	19960204 202203 1 005	PNS	Pengatur / II.c
37.	Wahyu Setyanto,SH	-	THL	-
38.	Irawan Andi Prasetio	-	THL	-
39.	Sigit Danu Asmoro, S.Sos	-	THL	
40.	Nita Ariyani, S.Sos	-	THL	
41.	Eka Masihi Juniyanto, S.I.Pust	-	THL	
42.	Elya Pangestuti, SP	-	THL	
43.	Lufika Herawati Lukito, A.Md	-	THL	
44.	Rengga Alan Diatmaja, SE	-	THL	
45.	Agung Widodo, SH	-	THL	
46.	Ratih Dwi Untari, SE	-	THL	
47.	Putri Nova Budi Dimastuti, S.Ak	-	THL	
48.	Bintar Bani Riyadi	-	THL	
49.	Rian Handoko Putro,	-	THL	

	SM			
50.	Sony Widiyarto, S.Kom	-	THL	

2).Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terisi

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	MEMEN UHI PERSY ARATA N DIKLAT PIM	MEME NUHI SYAR AT KEPA NG KATA N
1.	Sundoro Budhi Karyanto, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	YA	YA
2.	Soenarto, S.P, M.M	Sekretaris	YA	YA
3	Y. Anung Darmawan, SE	Kepala Bidang Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	YA	YA
4	Diana Ary Andriyati, S.H	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Belum Diklat	YA
5.	Ary Widyastutik, S.STP, M.M	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belum diklat Pim III	YA
6.	Agus Cahyono, S.Sos, MSi	Kepala Sub . Bagian Umum	Belum diklat Pim IV	YA

3). Daftar Pejabat Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang belum terisi

NO	JABATAN STRUKTURAL	ESELON
	Nihil	

Semua eselon IV kecuali Kasubag Umum dan Kepegawaian, mengalami penyetaraan menjadi Jabatan Fungsional.

4). Daftar Pejabat Fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Umum/khusus)

NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN FUNGSIONAL
1.	Sudinar, S.Pd, MM	19710319 199203 1 003	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
2.	Ngadiyono, SE, MM	19730211 199503 1 003	Perencana Ahli Muda
3.	Agus Setyawan, S.Sos	19710805 199301 1 002	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
4.	Harun Waskito, S.Sos, MAP	19800420 200912 1 001	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
5.	Ardhyka Mur Hermawan, SIP,MM	19870121 200701 1 002	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
6.	Rahayu Nurrohmani, SH	19790910 200604 2 017	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
7.	Dwi Prihanto, SIP, MSi	19810221 201001 1 017	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
8.	Sri Purwati,S.Sos	19791218 201101 2 009	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama
9.	Jalu Prasetya Aji, S.A.P, MSi	19800704 201101 1 010	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
10.	Willyanto Wardhana,S.Sos	19850419 201101 1 013	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda

11.	Irfan Afifudin,S.Sos	19850608 201101 1 013	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
12	Priska Hevianggitasari, S.Sos	19870130 201101 2 012	Penggerak Swadaya Masyarakat Muda
13	Andi Prasetyanto,A.Md	19860414 201001 1 012	Pranata Komputer Lanjutan
14	Agus Priyono, SE	19740820 200312 1 002	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa
15	Haryanti,S.Sos	19670109 199402 2 001	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Perencanaan dan Pelaporan
16	Eko Pujiati, SH	19800707 200604 2 027	Penata Laporan Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
17	Andri Yudiyanto, SE	19840517 201503 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
18	Zalduyah, S.Sos	19760723 200701 2 020	Pengembang Sarana dan Prasarana
19	Fajar Setya Nugraha, S.Kom	19871116 202012 1 006	Analisis Data dan Informasi
20	Wahono Guntur Prakosa, SE	19890220 202012 1 006	Analisis Desa/Kelurahan pada seksi pengelolaan informasi desa
21	Ippolita Suharto, SE	19930628 202012 2 007	Analisis Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah

22	Mario sebastian Prabowo, SIP	19890331 202203 1 002	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Perencanaan dan Pelaporan
23	Vika Mutiara Pradanai, S.Sos	19971219 202203 2 018	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada seksi partisipasi masyarakat desa dan pelestarian adat
24	Bagas Kurnia Adi, SIP	19981129 202203 1 006	Analisis Desa/Kelurahan pada seksi pengelolaan informasi desa
25	Alina Prama Septa, A.Md.	19880901 201503 2 003	Bendahara
26	Hartono	19790906 201001 1 012	Pengelola Kepegawaian pada Su Bag Umum
27	Dewan Sidiq Atmaja Putra, AMd	19901212 201503 1 006	Analisis Desa/Kelurahan Pada Seksi Pengelolaan Asset Desa
28	Suroto	19750627 200701 1 011	Analisis desa/Kelurahan pada Seksi Penata Usahaan Keuangan Desa
29	Tri Suwarno	19730219 200701 1 007	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum
30	Ramdhan Ashari, A.Md	19960204 202203 1 005	Verifikator

BAB III

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	IKK Output dan Capaian Kinerja		IKK Outcome	Rumus	Capaian Kinerja
1	1.	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	143,00 Desa Ket.:	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)
2	2.	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0,00 desa Ket.: penguatan kerjasama desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)
	3.	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	50,00 lembaga Ket.:		
	4.	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	9,00 lembaga/desa Ket.:		

C. URUSAN PILIHAN

Nihil

D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Nihil

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dokumen	1 (100%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen	1 (100%)		
				3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-	1 (100%)		

				Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.000.000,00 Persentase: (100,00%)	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen			
				4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggaran: Rp. 68.221.000,00 Realisasi: Rp. 66.976.100,00 Persentase: (98,18%)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 laporan	4 (100%)		
				5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Anggaran: Rp. 1.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen	1 (100%)		
		b. PROGRAM PENUNJANG	1)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan	25 (100%)		

			URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran: Rp. 28.766.500,00 Realisasi: Rp. 28.712.000,00 Persentase: (99,81%)	Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 unit			
				2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 39.100.000,00 Realisasi: Rp. 39.071.250,00 Persentase: (99,93%)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Di pelihara/Direhab ilitasi 1 unit	1 (100%)		
			c. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Anggaran: Rp. 2.000.000,00 Realisasi: Rp. 2.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 dokumen	1 (100%)		

			d. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Anggaran: Rp. 123.149.000,00 Realisasi: Rp. 113.592.000,00 Persentase: (92,24%)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 orang	46 (92%)		
			e. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Anggaran: Rp. 3.320.000,00 Realisasi: Rp. 3.240.000,00 Persentase: (97,59%)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-Undangan yang Disediakan 12 dokumen	12 (100%)		
				2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 14.175.000,00 Realisasi: Rp. 14.175.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket	12 (100%)		
			f. PROGRAM PENUNJANG	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	38 (100%)		

			URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Anggaran: Rp. 4.678.103.472,00 Realisasi: Rp. 4.560.589.193,00 Persentase: (97,49%)	Gaji dan Tunjangan ASN 38 orang/bulan			
			g. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 64.800.000,00 Realisasi: Rp. 63.759.265,00 Persentase: (98,39%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 laporan	3 (100%)		
				2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 99.998.800,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 laporan	3 (100%)		
			h. PROGRAM PENUNJANG	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan	18 (100%)		

			URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 182.727.757,00 Realisasi: Rp. 181.673.608,00 Persentase: (99,42%)	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 unit			
		i.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 6.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.995.400,00 Persentase: (99,92%)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 laporan	1 (100%)		
		j.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PE MERINTAHAN DAERAH KAB UPATEN/KOT A,	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 4.000.000,00 Realisasi: Rp. 3.995.500,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12	12 (100%)		

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase: (99,89%)	paket			
				2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Anggaran: Rp. 100.010.483,00 Realisasi: Rp. 99.827.400,00 Persentase: (99,82%)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 paket	4 (100%)		
				3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 159.794.000,00 Realisasi: Rp. 159.794.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan	12 (100%)		

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Nihil

C. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM DAN KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		a. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARA	1) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Anggaran: Rp. 1.542.860.000,00	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	5 (100%)		

			KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Realisasi: Rp. 1.542.568.950,00 Persentase: (99,98%)	Masyarakat 5 laporan			
			b. PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA,	1) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Anggaran:	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan	177 (100%)		

			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 7.945.000,00 Realisasi: Rp. 7.638.165,00 Persentase: (96,14%)	Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 177 dokumen			
			c. PROGRAM P ENINGKATAN KERJA SAMA DESA, Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 74.534.950,00 Persentase: (99,38%)	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Dokumen	1 (100%)		
				2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Anggaran: Rp. 50.000.000,00 Realisasi: Rp. 49.789.339,00 Persentase: (99,58%)	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Dokumen	1 (100%)		
			d. PROGRAM P EMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM	1) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Anggaran: Rp. 52.100.000,00 Realisasi: Rp. 52.031.000,00 Persentase: (99,87%)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 laporan	2 (100%)		

			ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
				2) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	3 (100%)	

				Anggaran: Rp. 186.340.000,00 Realisasi: Rp. 186.180.000,00 Persentase: (99,91%)	n Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3 dokumen			
			e. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1) Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Anggaran: Rp. 29.605.400,00 Realisasi: Rp. 28.548.900,00 Persentase: (96,43%)	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 laporan	40 (100%)		
				2) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Anggaran: Rp. 75.000.000,00 Realisasi: Rp. 67.881.500,00 Persentase: (90,51%)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen	1 (100%)		
				3) Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen	2 (100%)		

				Anggaran: Rp. 2.912.574.400,00 Realisasi: Rp. 2.868.284.745,00 Persentase: (98,48%)	Pengelolaan Keuangan Desa 2 dokumen			
			f. PROGRAM P EMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARA KATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaa n Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Anggaran: Rp. 40.000.000,00 Realisasi: Rp. 39.750.000,00 Persentase: (99,38%)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 2 dokumen	2 (100%)		

			Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			g. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1) Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Anggaran: Rp. 147.545.000,00 Realisasi: Rp. 141.142.500,00 Persentase: (95,66%)	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 dokumen	1 (100%)		
			h. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak	1) Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Anggaran: Rp. 100.000.000,00 Realisasi: Rp. 100.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa 1 dokumen	1 (100%)		

			di Bidang Pemberdayaa n Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabup aten/Kota serta Pemberdayaa n Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a				
			i. PROGRAM A DMINISTRASI PEMERINTAH AN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar aan Administrasi Pemerintahan Desa	1) Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Anggaran: Rp. 110.000.000,00 Realisasi: Rp. 109.744.789,00 Persentase: (99,77%)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1 dokumen	1 (100%)	
				2) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah dokumen	4 (100%)	

				Anggaran: Rp. 46.555.000,00 Realisasi: Rp. 45.839.700,00 Persentase: (98,46%)	penyusunan Perbup 4 dokumen			
				3) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Anggaran: Rp. 19.100.000,00 Realisasi: Rp. 18.279.000,00 Persentase: (95,70%)	Jumlah Dokumen Profil Desa 1 Dokumen	1 (100%)		
			j. PROGRAM PENATAAN DESA, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	1) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Anggaran: Rp. 190.000.000,00 Realisasi: Rp. 189.896.500,00 Persentase: (99,95%)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa 1500 unit	1.500 (100%)		
				2) Fasilitasi Tata Wilayah Desa Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.582.600,00 Persentase: (94,33%)	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 162 Desa	162 (100%)		
			k. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	1) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelen	1 (100%)		

			LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Ke masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Anggaran: Rp. 550.000.000,00 Realisasi: Rp. 549.705.692,00 Persentase: (99,95%)	Anggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen			
			I. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan	1) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Anggaran: Rp. 166.790.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan	1 (100%)		

			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Realisasi: Rp. 163.481.200,00 Persentase: (98,02%)	Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen			
				2) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Anggaran: Rp. 96.760.000,00 Realisasi: Rp. 94.127.300,00 Persentase: (97,28%)	jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 1134 orang	1.134 (100%)		
		m	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Anggaran: Rp. 5.509.400.000,00 Realisasi: Rp. 5.506.369.200,00 Persentase: (99,94%)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 lembaga	1 (100%)		

			Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
			n. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1)	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 22.983.400,00 Persentase: (91,93%)	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 laporan	1 (100%)	

D. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Nihil

E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

	<i>Nihil</i>
F. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
G. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
	<i>Nihil</i>
H. UNSUR KEWILAYAHAN	
	<i>Nihil</i>
I. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
	<i>Nihil</i>
J. UNSUR KEKHUSUSAN	
	<i>Nihil</i>

BAB V

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

A. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PUSAT YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kementerian / LPNK	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
1	Kemendes PDPT	PMK RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa TA 2024	Pogram Belanja Bantuan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Dana Desa (DD)	1 Terselenggara nya kegiatan Dana Desa	162 Desa	176.804.826 .000	100%	Terselenggara nya keg Dana Desa

B. TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Bidang Urusan	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
1	Dispermade sdukcapil	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pedoman Perubahan Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah	Pogram Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Terselenggara nya keg (Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana dan Prasarana	desa	115.245.578 .000	98,39%	Untuk 872 Titik lokasi realisasi 861 titik lokasi, realisasi anggaran Rp .113.395.578.000,-

C. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN KEPADA DESA

No	Kabupaten	Dasar Hukum	Program Kegiatan	Output	Lokasi	Alokasi	Kinerja	Keterangan
1	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penggunaan ADD Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 412/1277 Tahun 2023 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun 2024	Pogram Bantuan Keuangan ke Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	1 Pemberian Bantuan Keuangan ke Desa	162 desa	100.795.146.700	100%	Kecamatan Karanganyar tidak ada desa
2	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.4/731 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 412/1278	Pogram Bantuan Keuangan ke Desa Kegiatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	1 Tersalurnya Bagi Hasil Retribusi Daerah	162 Desa	1.015.733.900	100%	Kec, Karanganyar Tdak ada Desa
3	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.4/731 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 412/1278	Pogram Bantuan Keuangan ke Desa Kegiatan Bagi Hasil Pajak Daerah	1 Tersalurnya keg Bagi Hasil Pajak Daerah	162 desa	21.770.093.000	100%	Kecuali Kec. Karanganyar yg tidak ada desa
4	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	SK Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.4/732 Tahun 2024 tentang	Pogram Bantuan Keuangan kepada Desa Kegiatan Bantuan	1 Tersalurnya bantuan keuangan sarpras	Desa	56.794.000.000	1.088 Titik (100%)	Kecamatan Karanganyar tidak ada desa

		Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 400.10.2.4/351 Tahun 2024	Keuangan Sarana dan Prasarana kepada Desa					
5	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	SK Bupati Karanganyar Nomor 400.10.2.4/750 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana desa Tahun 2024 Tahap II	Pogram Bantuan Keuangan ke Desa Kegiatan Bantuan Keuangan Sarpras Desa	1 Tersalurnya bantuan keuangan Sarpras Desa	desa	7.365.000.000	265 titik lokasi	Realisasi : Rp.17.290.000.000,- (99,6%) 265 Titik lokasi

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	Aplikasi PDKT	Aplikasi Perangkat Desa Karanganyar Tentram
2	SIM PKK	Sistem Informasi Manajemen PKK

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Juara Harapan I	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

BAB VIII

PENUTUP

1. Pelaksanaan Tugas Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2024, secara umum telah dapat berjalan baik dan sangat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat, sehingga kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat diharapkan masyarakat sebagai wahana untuk pencapaian kesejahteraan dan percepatan perkembangan perekonomian masyarakat yang menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun anggaran yang akan datang agar program dan kegiatan yang ada perlu terus dilanjutkan sehingga melalui program kegiatan tersebut dapat dijadikan sarana guna terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 31 Desember 2024
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR

SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P
NIP. 19720620 199203 1 002